

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN PADA
INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) di KALIMANTAN TENGAH
SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DALAM PERUBAHAN SOSIAL
(Studi Pada Pengembangan Potensi Produk Rotan)**

Oleh:

Saputra Adiwijaya

Jurusan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Palangkaraya
Kalimantan Tengah

Email : s_adiwijaya@ymail.com

Pipit Anggriati Ningrum

Penyuluh pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah

Email : phietningrum0205@gmail.com

ABSTRACT:

Changes in society through entrepreneurship have provided many opportunities for the community to go towards independence or in other words empowering the community. The opening of a society in the global era has placed the study of entrepreneurship as one of its pillars. In the end community empowerment through entrepreneurship provides benefits for community development in a positive direction, this also has a significant impact that the economy of the community through entrepreneurship is better.

Government support through Bekraf (Creative Economy Agency) and supported synergistically with the Office of Industry and Trade and other supporting institutions has made entrepreneurship to date as one of the people's choices in welcoming the global era.

This paper tries to provide an analytical point of view that in Central Kalimantan Province the change of society through entrepreneurship by utilizing natural resources in the form of rattan products becomes an important thing in providing its own meaning to the community through the development of a creative economy by not leaving the potential of locality as Dayaks have the motivation to develop in a better direction. But on the side of empowerment in the context of entrepreneurship, especially the development of rattan products also received threats.

Keywords: *Community Change, Entrepreneurship, Small and Medium Industries.*

ABSTRAK:

Perubahan masyarakat melalui kewirausahaan telah memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk menuju ke arah kemandirian atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat. Terbukanya suatu masyarakat dalam era global telah menempatkan kajian kewirausahaan sebagai salah satu pilarnya. Pada akhirnya pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan memberikan manfaat bagi pengembangan masyarakat ke arah yang positif, hal ini juga mempunyai dampak

yang signifikan bahwa perekonomian masyarakat melalui kewirausahaan menjadi lebih baik.

Dukungan pemerintah melalui Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dan ditunjang sinergisnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta lembaga pendukung lainnya menjadikan kewirausahaan hingga saat ini sebagai salah satu pilihan masyarakat dalam menyambut era global.

Tulisan ini mencoba memberikan sudut pandang analisis bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah perubahan masyarakat melalui kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa produk dari hasil rotan menjadi hal yang penting dalam memberikan makna tersendiri bagi masyarakatnya melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan tidak meninggalkan sisi potensi lokalitas sebagai orang Dayak yang mempunyai motivasi untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Namun pada sisi pemberdayaan dalam konteks kewirausahaan terutama pengembangan produk rotan pun mendapatkan ancaman.

Keywords : *Perubahan Masyarakat, Kewirausahaan, Industri Kecil Menengah.*

I. PENDAHULUAN

Era global saat ini telah banyak memberikan perubahan dalam suatu masyarakat pada sisi yang lain perubahan masyarakat bisa juga dimaknai dari terbukanya masyarakat itu sendiri. Keterbukaan itu bisa dilihat salah satunya melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang – peluang yang berkembang di masyarakat bisa dilihat salah satunya dalam kewirausahaan.

Ada sebuah tema menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi bahwa kewirausahaan menjadikan masyarakat menjadi semakin tertantang melakukan perubahan sosial. Masyarakat yang terbuka seperti yang ada di Kalimantan Tengah dengan mayoritas suku Dayak mencoba memanfaatkan peluang tersebut dengan memaksimalkan wirausaha sebagai wadah untuk mengaplikasikan diri demi sebuah kemandirian.

Pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah turut mendukung bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang dalam kewirausahaan. Keadaan ini oleh Austin, Stevenson, dan

Wei-Skillern (2006) dimaknai sebagai suatu aktivitas inovatif yang menciptakan nilai sosial di dalam atau melalui sektor pemerintah, bisnis, atau nirlaba.

II. TEORI DAN PEMBAHASAN

1.1. **Industri Kecil Menengah (IKM) di Kalimantan Tengah**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah banyak melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan produk lokal agar masyarakat bisa mandiri dengan kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya ketika berfokus kepada masyarakat biasanya berupa pameran, pelatihan, hingga event yang sifatnya kompetisi. Pada bagian lain dinas ini melalui hasil pendataan yang dilakukan untuk jumlah IKM se-Kalimantan Tengah dapat dilihat seperti di bawah ini :

DATA INDUSTRI SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

NO	KABUPATEN	JUMLAH UNIT PRODUKSI	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU
					(Rp. 000)	(Rp. 000)
1	PALANGKA RAYA	1.065	3.620	49.352.596	117.173.479	21.635.495
2	PULANG PISAU	240	631	821.893	11.178.696	695.306
3	KAPUAS	1.027	4.872	682.587	1.580.577	978.424
4	GUNUNG MAS	304	668	19.303.248	15.662.096	16.283.924
5	SERUYAN	496	1.303	11.941.781	43.392.298	11.383.780
6	KOTAWARINGIN TIMUR	322	1.393	8.817.230	33.656.666	10.540.960
7	KOTAWARINGIN BARAT	1.697	550	76.573.131	68.259.346	36.544.080
8	MURUNG RAYA	144	306	6.078.800	4.666.150	2.092.900
9	LAMANDAU	215	540	8.290.608	9.237.515	5.487.800
10	SUKAMARA	495	1.083	3.011.770	59.802.291	48.645.660
11	BARITO SELATAN	384	1.407	6.055.738	14.274.155	7.002.011
12	BARITO UTARA	379	1.406	11.680.248	20.515.565	8.823.972
13	BARITO TIMUR	338	1.090	7.914.450	101.665.990	40.533.455
14	KATINGAN	582	2400	56.017.350	60.030.940	29.391.210
TOTAL		7.688	21.269	266.541.430	561.095.764	240.038.977

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, 2018. Kotawaringin Barat mempunyai jumlah unit produksi sebanyak 1.697 unit namun hanya

Begitu besarnya peran dinas ini kepada masyarakat, paling tidak sejak tahun 2017 di Kalimantan Tengah total penyerapan tenaga kerja dari 14 kabupaten/kota terdapat 21.269 tenaga kerja terserap dengan nilai investasi sebesar Rp. 266.541.430,- dan dengan jumlah unit produksi sebanyak 7.688 unit. Lebih lanjut dari data ini terlihat juga bahwa Kabupaten

menyerap 550 tenaga kerja. Kemudian kota Palangkaraya sebanyak 1.065 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.620 tenaga kerja, dan kabupaten Kuala Kapuas sebanyak 1.027 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.872 tenaga kerja terserap. Dari data ini juga bisa dilihat jumlah unit produksi paling sedikit adalah kabupaten Murung Raya

dengan jumlah 144 unit yang hanya mampu menyerap 306 tenaga kerja.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan

Pemberdayaan itu sendiri tidak lepas sebenarnya sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, makna pembangunan tidak hanya dalam arti yang sederhana namun mencakup seluruh bidang bagi sebuah bangsa. Perubahan paradigma pembangunan pada masa sekarang telah menjadikan masyarakat dituntut berperan serta dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Jika sebelumnya masyarakat hanya sebagai penikmat atau bahkan penonton saja dalam proses pembangunan maka pada masa sekarang masyarakat berhak mempunyai andil dalam proses pembangunan itu. Idealnya adalah tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah sehingga program pembangunan yang ditujukan ke masyarakat dapat tepat sasaran dan tidak sia-sia. Masyarakat perlu memberikan masukan, dan pemerintah berkewajiban memperhatikan segala macam masukan itu, namun pada prakteknya terkadang pemerintah mengabaikan segala macam masukan itu, sehingga pembangunan menjadi tidak tepat.

Salah satu yang menjadi acuan yang terkait dalam kajian ini bahwa pemberdayaan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia, karena disinilah pemahaman mendasar untuk melihat pemberdayaan secara komprehensif. Maka kemudian oleh UNDP (*United Nations Development Program*) mendefinisikan pembangunan manusia (*human development*) sebagai perluasan pilihan bagi setiap orang untuk hidup lebih panjang, lebih sehat dan hidup lebih bermakna (UNDP, HDR 1990). Memperluas pilihan manusia berarti mengasumsikan suatu kondisi layak hidup yang memungkinkan manusia memperoleh akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak

(Chakraborty, 2002). Pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan seseorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan (Suhandojo, 2002). Menurut Ranis dan Stewart (2000) mengartikan pembangunan manusia sebagai peningkatan kondisi seseorang sehingga memungkinkan hidup lebih panjang sekaligus lebih sehat dan lebih bermakna. Pembangunan manusia adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia terutama melalui peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan, sehingga membuat manusia menjadi lebih sehat, dan lebih produktif sehingga memungkinkan untuk meraih peluang-peluang yang tersedia bagi dirinya masing-masing. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak hanya ditujukan kepada kehidupan pribadi, tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan yang dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik lebih efektif sehingga dapat tercipta masyarakat sehat.

Salah satu hal penting juga dalam paradigma pembangunan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat adalah pemberdayaan. Pemberdayaan secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya memampukan masyarakat agar mempunyai posisi tawar yang strategis terhadap segala macam program pemerintah agar masyarakat dapat menikmati hasil atau efek dari berbagai macam program itu demi kelangsungan kehidupannya yang lebih baik.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mardikanto (2010) istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres no. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres IDT (Inpres Desa Tertinggal). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan

“saudara kembar” yang selalu menjadi topic dan kata kunci dari upaya pembangunan.

Maka kemudian pengertian pemberdayaan sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rappaport dalam Suharto (1998); “pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”, jadi tujuan pemberdayaan pada hakekatnya seperti yang dijelaskan Ife (2008): “*Empowerment aims to increase the power of disadvantage..*”.

Kemudian pada bagian lain menurut Dharmawan (2000) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai “*A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living*”.

Dengan kata lain pemberdayaan sebagai sebuah proses dari upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang didalamnya termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan segala aktifitasnya.

1. Jika berkenaan dengan kemampuan orang, yang berkaitan dengan mereka yang masuk dalam kategori rentan dan lemah, maka pemberdayaan oleh Swift and Levin (1987) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) melihatnya dalam dua hal :
2. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Sedangkan dalam bagian lain Payne (1997) memberikan pemahaman tentang pemberdayaan sebagai suatu strategi pembangunan, yang mana pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Kemudian hal ini ditambahkan oleh Ife (2008) bahwa pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber penghidupan, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

- Dalam kondisi ini kewirausahaan menjadi jalan tengah bagi masyarakat di Kalimantan Tengah karena dukungan pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bahwa ada sebuah kesempatan menjadi berdaya guna melalui kemandirian dengan pengenalan potensi lokal yang kemudian di manfaatkan untuk menambah pendapatan. Dalam bagian lain pemerintah sekarang telah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), badan ini bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bekraf menyelenggarakan beberapa fungsi, sebagai berikut:
- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif

- Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif.
- Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif.
- Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tersebut, Bekraf optimistis bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang efisien dan kondusif. Dengan begitu, para pelaku bisa berkarya lebih baik sehingga ekonomi kreatif bisa memberikan kontribusi pendapatan yang selalu meningkat terhadap PDB nasional.

2.3 Salah Satu Contoh Potensi Yang Bisa Dikembangkan Dan Ancamannya

Industri kecil menengah (IKM) yang berbasis rotan bisa menjadi contoh betapa kayanya Kalimantan Tengah akan sumber daya alam ini, selama ini rotan hanya dibuat produk sederhana misalnya tas, atau tikar. Namun sekarang produk rotan sudah lebih berkembang misalnya dibuat kursi, sajadah, topi, bahkan sampai tempat untuk membawa bunga dan sudah menembus pasar internasional. (beritasampit.go.id).

Adanya kesadaran bahwa rotan menjadi sebuah potensi yang bisa berkembang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan pembenahan atas potensi sumber daya alam ini dengan program pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengembangan

industri rotan, berupa pelatihan pengolahan furniture. Hal ini juga dalam Budiono (2017) yang mengutip dari media Metro7 bahwa ditahun 2013 daerah Kabupaten yaitu Barito Selatan, Barito Utara dan Barito Timur telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) atau nota kesepahaman tentang pengembangan industri rotan dengan perusahaan swasta, kemudian pada tahun 2015 pemerintah meresmikan Sistem Resi Gudang (SRG) rotan pertama di Indonesia, berada di Kawasan Industri Rotan Hampangen, Kabupaten Katingan. Pengembangan komoditas SRG, khususnya rotan, sebagai tujuan agar produksi rotan yang dihasilkan di daerah sentra produksi dapat diserap dengan mudah dan terjamin mutunya oleh industri. Ketersediaan stok rotan yang memenuhi kebutuhan industri rotan dapat menjadi modal utama tumbuhnya industri rotan dalam negeri yang berdaya saing, mampu mengoptimalkan integrasi hulu dan hilir, antara kebutuhan petani dengan industri (Kementerian Perdagangan, 2015).

Lebih lanjut selain di empat Kabupaten tersebut, Kabupaten Kapuas juga terus mengembangkan sentra industri kerajinan rotan yang menjadi produk andalan. Setidaknya, daerah itu memiliki dua sentra pengembangan industri kerajinan rotan. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas sudah membangun sentra industri Kecamatan Kapuas Barat, Desa Mandomai dan tahun 2017 akan dibangun di Kecamatan Selat, tepatnya di Desa Pulau Telo ([Borneonews](http://Borneonews.com), 2017). Begitu pula dengan Kabupaten Pulang Pisau yang mengembangkan Sentra Industri Rotan di Desa Gohong (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah).

Rotan sebagai tumbuhan khas orang Dayak di Kalimantan Tengah telah memberikan sebuah makna tersendiri ketika rotan telah menjadi sebuah produk sehingga ada tinjauan diskusi dalam analisis ini bahwa pemberdayaan masyarakat tercipta karena adanya peluang

wirausaha yang menjadi salah satu penopang masyarakat khususnya masyarakat Dayak. Hal ini lah kemudian menjadi salah satu acuan adanya perubahan masyarakat Dayak.

Pada sisi yang lain ketika komoditi rotan telah memberikan peluang bagi pendapatan masyarakat Dayak kemudian tercipta sebuah kesadaran untuk lebih peduli menjaga alam hal ini juga di topang untuk menjaga identitas sebagai orang Dayak yang juga lebih peduli dengan kerajinan produk lokal. Hal ini ditandai dengan banyak dikenalnya produk rotan yang mudah dijumpai dan dipakai.

Berkebalikan dari fenomena diatas sebenarnya dalam masyarakat yang terbuka saat ini bahwa perubahan yang dialami IKM di Kalimantan Tengah dengan produk yang berbasis rotan telah tidak luput dari adanya ancaman. Hilangnya eksistensi nilai kerajinan lokal bagi masyarakat Kalimantan Tengah salah satunya. Betapa tidak era digital telah membuat banyak kalangan terbuai dengan berbagai peluang semu, yang dalam kaitan ini menjadikan rotan sebatas produk yang tidak bernilai. Banyaknya produk alternatif menjadikan produk rotan seakan-akan seperti kalah dari sisi harga dan kualitas, hal ini ditambah lagi lamanya pengerjaan satu produk yang memang sangat mengadakan sisi anyaman dengan tangan. Hal ini pun diperparah dengan keadaan banyak berpindahnya profesi orang-orang Dayak yang leluhurnya sebagai pengrajin rotan, namun generasi sekarang tidak mau meneruskan profesi tersebut.

Kebakaran hutan akibat alih fungsi lahan turut pula mendukung ancaman ini ditengah isu dan kampanye pelestarian alam namun keadaan ini kalah oleh kekuasaan pemimpin daerah yang menekankan pada percepatan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan memperbanyak izin perkebunan.

2.4 Beberapa Tawaran Solusi

Pemberdayaan yang mempunyai

pengaruh dalam perubahan masyarakat dalam bidang kewirausahaan dengan fokus pada pengembangan potensi rotan yang ada di Kalimantan Tengah tetap memerlukan sebuah solusi, berikut ini beberapa tawaran solusi diantaranya : *Pertama*, pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang betapa rumitnya mengayam sebuah produk yang berbahan rotan. Dari sini diharapkan masyarakat bisa menghargai sebuah kerajinan *handmade* dan ketika dinilai dengan harga pantas maka masyarakat pun tidak merasa keberatan membeli produk tersebut. Kemudian munculnya kebanggaan menggunakan produk rotan *handmade* (bukan pabrikan) sehingga semua generasi bisa memaknai ini sebagai sesuatu yang positif bagi pengenalan rotan sebagai ciri khas Kalimantan Tengah khususnya masyarakat Dayak. Dari sini lah kemudian memunculkan antusiasme pasar terhadap produk berbahan rotan.

Kedua, mengencarkan promosi. Produk IKM apa pun itu dalam konteks kewirausahaan yang menjadi pilar utamanya adalah promosi. Dalam era digital promosi melalui media internet sangat penting dilakukan secara *online* ditambah pula dukungan pemerintah melalui event pameran, atau expo yang menampilkan produk rotan.

Ketiga, membuat peraturan agar produk rotan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, misalnya furniture kantor wajib di beberapa bagian menggunakan produk dari rotan, dalam aturan ini tercakup spirit adanya edukasi dan promosi atas produk rotan tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan produk rotan secara lebih luas di Kalteng. Dalam surat itu, pemerintah kabupaten/kota diminta menggunakan produk rotan di kantor dan sekolah. Surat dengan nomor 800/862.1/Disperindag/X/2011 itu tentang Gerakan Bersama Wajib Menggunakan Produk Lokal Berbasis Rotan.

Produk tersebut seperti kursi tamu, kerja, dan rapat dari rotan untuk digunakan di kantor pemerintah kabupaten/kota, satuan kerja perangkat daerah, hingga kantor kelurahan/desa. Penempatan produk rotan juga diminta dilakukan di mushala milik Pemerintah Daerah dan sekolah negeri semua tingkatan. Surat edaran itu bertujuan meningkatkan taraf hidup pemetik rotan. Jika isi surat edaran itu bisa dipatuhi, penyerapan rotan pada tingkat petani bisa meningkat. Bapak Henky selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, pembuatan surat edaran tidak akan serta-merta membuat industri rotan bermunculan di Kalteng. Akan tetapi, setidaknya ada upaya untuk menumbuhkan sektor hilir. Selama ini, industri rotan tumbuh hanya di Jawa. Henky menuturkan, industri juga perlu ditumbuhkan di Kalteng sebagai daerah penghasil rotan. Manfaat pertumbuhan industri akan dirasakan masyarakat dengan mendapatkan nilai tambah.

III. PENUTUP

Terbukanya masyarakat akibat pengaruh globalisasi telah menciptakan peluang-peluang yang membuat makna pemberdayaan menjadi semakin berkembang. Salah satu hal yang menjadi fokus dari pemberdayaan dalam konteks saat ini adalah bidang kewirausahaan yang membuat masyarakat memiliki cita-cita ideal menjadi masyarakat yang mandiri.

Pemerintah yang mempunyai peran turut memberikan dukungan dalam tumbuhnya kewirausahaan dengan sinergisnya dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dan untuk masyarakat telah banyak berdiri Industri Kecil Menengah (IKM).

Bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang mayoritas beretnis Dayak, kondisi yang ada ini turut memberikan pengaruh bagi perubahan tatanan yang telah lama tidak

mengalami dinamisasi. Peluang memanfaatkan potensi hasil alam berupa produk olahan rotan menjadi produk yang berkualitas dan bernilai menciptakan sebuah fenomena adanya kesadaran akan pentingnya makna rotan yang tidak hanya sebagai barang sederhana namun lebih ke arah memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun tidak melupakan adanya sebuah entitas sebagai orang Dayak.

Adanya ancaman-ancaman yang mungkin bisa mengabaikan entitas itu tentu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat itu sendiri agar mampu berbenah dalam menyambut tantangan global, dan dipastikan akan adanya kompromi-kompromi, dan adaptasi-adaptasi agar keberlangsungan sebuah entitas tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J., H. Stevenson, dan J. Wei-Skillern. 2006. " *Social and Commercial Entrepreneurship : Same, Different, or Both ?*" *Entrepreneurship Theory and Practice*. Vol. 30 Issu 1, p 1-22.
- Chakraborty, A.K. 2002. *Development Of Predictive Model For Optimum Blast Design In Mine Roadways In Tunnels Under Various Rock Mass Conditions*. PhD Thesis, Indian School of Mines, Dhanbad, India.
- Data IKM, 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ife, J. dan Tesoriero, F. 2006. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalization*. Edisi Ketiga. Pearson Education Australia. Terjemahan Sastrawan
- Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Pertanian UNS-UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).

- Surakarta.
- Mardikanto, Totok. Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*. Basingstoke, MacMillan. Hampshire (UK).
- Suhandoyo. 2002. "Pengembangan Wilayah Pedesaan dan Kawasan Tertentu: Sebuah Kajian Eksploratif". Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. New York : Oxford University Press.
- Sumber Internet :**
- <https://beritasampit.co.id/2018/04/18/ajib-kerajinan-rotan-kapuas-sukses-tembus-pasar-internasional/> diakses 7 September 2018, pukul 20 : 29 WIB
- <http://koranmetro7.blogspot.com/2013/06/tiga-bupati-tandatangan-mou.html> diakses 7 September 2018, diakses pukul 21:02 WIB.
- <http://www.bekraf.go.id/profil/tugas> diakses 7 September 2018, pukul 22.02 WIB.
- <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/12/22/resmikan-srg-rotan-kemendag-fakta-indonesia-penyuplai-80-kebutuhan-rotan-dunia-id0-1450774221.pdf> diakses 8 September 2018, pukul 21.00 WIB.
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6484/Pengembangan-Industri-Rotan-Diarahkan-ke-Sentra-Bahan-Baku> diakses 8 September 2018, pukul 21.20 WIB.
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/11/02/22593281/pemprov.kalteng.edarkan-surat.penggunaan.produk.rotan> diakses 10 September 2018, pukul 21.20 WIB
- http://www.academia.edu/36632545/PROSPEK_INDUSTRI_ROTAN_KALTENG.pdf diakses 12 September 2018, pukul 00.04 WIB